



KATALOG BPS : 9506002

NERACA LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA TAHUN 2011-2013



BADAN PUSAT STATISTIK - INDONESIA



KATALOG BPS : 9506002

NERACA LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA TAHUN 2011-2013



BADAN PUSAT STATISTIK - INDONESIA

**NERACA LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI
RUMAHTANGGA TAHUN 2011-2013**

NOMOR KATALOG : 9506002
ISBN : 978-979-064-735-0
NOMOR PUBLIKASI : 07210.1402

UKURAN BUKU : 17.6 x 25 CM
JUMLAH HALAMAN : 60 HALAMAN

NASKAH:

**SUB DIREKTORAT NERACA RUMAHTANGGA DAN INSTITUSI
NIRLABA**

GAMBAR KULIT:

**SUB DIREKTORAT NERACA RUMAHTANGGA DAN INSTITUSI
NIRLABA**

DITERBITKAN OLEH:

BADAN PUSAT STATISTIK

DICETAK OLEH:

BADAN PUSAT STATISTIK

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

KATA PENGANTAR

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan kalangan dunia usaha. Mereka membentuk lembaga atau unit institusi yang menyediakan jasa untuk pengembangan SDM di Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat lebih aktif dan mandiri. Unit insitusi semacam ini di dalam *System of National Accounts* yang baru (SNA 2008) dikenal sebagai Lembaga Nonprofit (LNP).

Publikasi ini hanya mencakup LNP yang menyediakan barang dan jasa secara gratis (atau pada harga non-komersial) kepada anggotanya atau rumahtangga dan tidak dikontrol pemerintah, atau dalam SNA 2008 disebut sebagai LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT). Seluruh aktivitas ekonomi LNPRT dikompilasi dalam bentuk neraca tahun 2011-2013. Aktivitas ekonomi yang dimaksud mencakup aktivitas produksi, aktivitas konsumsi, dan aktivitas investasi. Informasi ini diharapkan bermanfaat di dalam penyusunan Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI), serta sebagai bahan kajian untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam mewujudkan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan kualitas publikasi ini di masa yang akan datang.

Jakarta, November 2014

Direktur Neraca Pengeluaran

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sistematika penyajian	3
BAB II. NERACA LNP YANG MELAYANI RUMAHTANGGA	
2.1. Neraca LNPRT dalam Sistem Neraca Nasional Indonesia	5
2.2. Kerangka Neraca LNPRT	7
2.3. Konsep dan Definisi	10
BAB III. ULASAN SINGKAT HASIL PENYUSUNAN	
3.1. Indikator Aktivitas Lembaga	25
3.2. Aktivitas Produksi	26
3.3. Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran	29
3.4. Aktivitas Investasi	34
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
1. Gambar 3.1. Persentase aktivitas ekonomis produktif terhadap output menurut jenis LNPRT, 2011-2013	28
2. Gambar 3.2. Persentase biaya produksi terhadap output menurut jenis LNPRT, 2011-2013	29
3. Gambar 3.3. Persentase pendapatan LNPRT menurut jenisnya, 2011-2013...	30
4. Gambar 3.4. Persentase penerimaan transfer LNPRT menurut lembaga pemberi, 2011-2013	31
5. Gambar 3.5. Persentase pengeluaran LNPRT menurut jenisnya, 2011-2013	33
6. Gambar 3.6. Persentase sumber dana investasi menurut jenis LNPRT, 2013	35
7. Gambar 3.7. Persentase investasi fisik dan finansial LNPRT, 2011-2013.....	36
8. Gambar 3.8. Persentase PMTB LNPRT menurut bentuknya, 2011-2013	37

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
1.1 Neraca Produksi LNPRT Periode 2011-2013	41
1.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRT Periode 2011-2013.....	42
1.3 Neraca Modal dan Keuangan LNPRT Periode 2011-2013.....	43
2.1 Struktur Neraca Produksi LNPRT Tahun 2011.....	44
2.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRT Tahun 2011.....	45
2.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPRT Tahun 2011	46
3.1 Struktur Neraca Produksi LNPRT Tahun 2012.....	47
3.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRT Tahun 2012.....	48
3.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPRT Tahun 2012	49
4.1 Struktur Neraca Produksi LNPRT Tahun 2013.....	50
4.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRT Tahun 2013.....	51
4.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPRT Tahun 2013	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Lembaga Non-profit (LNP) di dalam suatu perekonomian menjadi pelengkap dari pelaku ekonomi lainnya seperti unit rumahtangga, pemerintah, dan korporasi. Secara luas LNP lebih dikenal sebagai "lembaga non pemerintah" atau *Non-Governmental Organization*, yang banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

"Lembaga non pemerintah" atau Non Governmental Organization (NGO), bergerak di bidang jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

Di Indonesia fungsi yang diperankan oleh LNP cukup penting. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah sumber daya manusia (SDM) dan kemiskinan. Di sektor yang belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah inilah, sering kali LNP ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja dari pemerintah.

Aktivitas LNP dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia telah berlangsung lama, bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai perkumpulan atau organisasi seperti Boedi Oetomo (1908), Muhammadiyah (1912), dan organisasi Taman Siswa (1926). Peran LNP yang telah berjuang tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Memasuki era demokrasi seperti saat ini, banyak bermunculan lembaga sejenis, baik yang didirikan oleh individu, kelompok masyarakat, pemerintah, maupun oleh kalangan dunia usaha. Masing-masing lembaga didirikan

dengan tujuan dan motivasi yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Ada lembaga yang didirikan atas dasar kemanusiaan dan cinta terhadap sesama seperti Palang Merah Indonesia, Yayasan Dharmais, dan Yayasan Kanker Indonesia. Ada pula lembaga yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan kelompok masyarakat tertentu, seperti berbagai lembaga penyelenggara panti, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga keagamaan. Di samping itu, ada lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik kelompok tertentu dalam bidang bisnis atau politik seperti berbagai organisasi kemasyarakatan, asosiasi bisnis, dan serikat pekerja.

Menurut System of National Accounts tahun 2008 (SNA 08) aktivitas Lembaga Non Profit dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat merupakan aktivitas ekonomi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa LNP atau ormas (organisasi kemasyarakatan) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. LNP merupakan lembaga formal maupun lembaga informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau kalangan dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan khusus bagi anggota atau kelompok masyarakat tertentu tanpa ada motivasi untuk meraih keuntungan.

Menurut *System of National Accounts (SNA) 2008*, aktivitas LNP dalam penyelenggaraan jasa pelayanan kepada masyarakat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tersebut mencakup produksi, konsumsi,

dan investasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LNP merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional disamping pelaku ekonomi lain yang telah dikenal yaitu rumah tangga, pemerintah, dan korporasi.

LNP yang tercakup dalam publikasi ini adalah LNP yang melayani rumah tangga atau disebut LNPRT. LNPRT adalah LNP yang menyediakan barang dan jasa secara gratis (atau pada harga non-pasar) kepada anggotanya atau rumah tangga dan tidak dikendalikan pemerintah. Informasi tentang perkembangan aktivitas ekonomi LNPRT dari tahun ke tahun dituangkan dalam bentuk neraca.

1.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi Neraca LNPRT Tahun 2011-2013 ini, disajikan dalam tiga bab. Secara garis besar, masing-masing bab itu menguraikan hal-hal berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan keberadaan LNP secara umum dan LNPRT secara khusus sebagai salah satu pelaku dalam perekonomian nasional. Diuraikan pula alasan pentingnya dilakukan penyusunan Neraca LNPRT Tahun 2011-2013. Sistematika penyajian juga diuraikan di bab ini.

Bab II Neraca LNPRT, pada bab ini diuraikan hubungan dan posisi Neraca LNPRT di dalam Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI). Di samping itu diuraikan pula kerangka Neraca LNPRT Tahun 2011-2013, serta konsep, definisi, dan sumber data yang digunakan dalam menyusun Neraca LNPRT.

Bab III Ulasan Singkat, pada bab ini diuraikan berbagai agregat ekonomi makro LNPRT dan disajikan dalam

bentuk aktivitas LNPRT yang tercermin dalam neraca disertai analisis deskriptif.

<https://www.bps.go.id>

BAB II**NERACA LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA****2.1. Neraca LNPRT dalam Sistem Neraca Nasional Indonesia**

Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts*) merupakan standar rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Sistem Neraca Nasional menyediakan catatan rinci dan menyeluruh tentang aktivitas ekonomi yang kompleks yang berlangsung dalam suatu perekonomian, serta interaksi antar pelaku atau kelompok pelaku ekonomi yang berbeda.

Neraca Nasional (*national accounts*) merupakan bentuk tampilan data ekonomi makro, yang menggambarkan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh seluruh sektor institusi di dalam perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Dalam Neraca Nasional, data transaksi itu menunjukkan besarnya transaksi (*transactions*) yang dilakukan para pelaku ekonomi (*transactors*) serta terkait dengan jenis aktivitas ekonomi (*category*) tertentu. Pelaku transaksi terdiri dari unit rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, korporasi, dan pemerintah (disebut unit residen), serta unit non-residen. Sedangkan jenis aktivitas ekonomi yang utama terdiri dari aktivitas produksi, konsumsi, serta akumulasi aset (finansial dan non finansial).

Neraca Nasional menyajikan perkiraan transaksi (dinyatakan dengan nilai uang) produksi, distribusi pendapatan, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan sebagainya untuk seluruh pelaku ekonomi. Secara keseluruhan, berbagai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi ini akan membentuk Neraca Nasional. Oleh karena itu, Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) terdiri dari empat neraca utama, yaitu Neraca Produksi, Neraca Penerimaan dan Pengeluaran, Neraca Modal dan Keuangan untuk masing-masing sektor institusi, dan Neraca Luar Negeri.

Neraca Produksi merupakan bentuk tampilan data tentang aktivitas produksi. Neraca ini menggambarkan besaran barang dan jasa yang dihasilkan (output), input yang digunakan dalam proses produksi (konsumsi antara), serta nilai tambah yang tercipta.

Neraca Penerimaan dan Pengeluaran merupakan bentuk tampilan data tentang aktivitas konsumsi atau penerimaan dan pengeluaran. Neraca ini menggambarkan besaran dan komposisi pendapatan yang diterima, serta pengeluaran yang dilakukan atas pendapatan tersebut. Selisih antara seluruh pendapatan dan pengeluaran adalah tabungan.

Neraca Modal dan Keuangan merupakan bentuk tampilan data tentang aktivitas investasi. Neraca ini menggambarkan besaran dan komposisi investasi baik dalam bentuk finansial maupun non finansial, serta sumber pembiayaan investasi seperti dari tabungan, penyusutan barang modal, dan transfer modal.

Neraca Luar Negeri merupakan bentuk tampilan data tentang transaksi antara pelaku domestik dan asing. Neraca ini menggambarkan besaran dan komposisi berbagai transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi domestik (*resident*) dengan pelaku ekonomi yang berada di luar wilayah domestik (*non-resident*).

Sektor institusi terdiri dari seluruh unit institusi yang homogen atau hampir homogen, serta memainkan peran atau fungsi yang sama dalam suatu perekonomian. Sektor institusi terdiri dari Sektor Rumahtangga, Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPR), Sektor Pemerintahan Umum, Sektor Korporasi Non-finansial, Sektor Korporasi Finansial, serta Sektor Luar Negeri. Masing-masing sektor dapat dikompilasi menurut jenis neraca sebagaimana telah disebutkan di atas atau secara keseluruhan menggambarkan kondisi ekonomi secara nasional.

Neraca Nasional merupakan agregasi dari neraca sejenis dari berbagai sektor institusi yang membentuk suatu perekonomian. Sehingga, agregasi Neraca Produksi sektor institusi yang melakukan aktivitas produksi akan dihasilkan Neraca

Produksi Nasional. Pengertian yang sama juga berlaku untuk Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dan Keuangan. Hal ini tidak berarti bahwa Neraca Nasional disusun dari neraca masing-masing sektor. Neraca Nasional dapat disusun secara independen dari neraca yang sama untuk masing-masing sektor.

Penyusunan neraca menurut sektor institusi dimaksudkan agar dapat mengungkap keterkaitan antara berbagai sektor institusi sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi secara simultan selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, landasan model dan sistem yang terintegrasi diperlukan menurut masing-masing institusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Neraca LNPRT merupakan bagian dari SNNI.

2.2. Kerangka Neraca LNPRT

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Data tentang aktivitas ekonomi LNPRT digambarkan dalam Neraca Produksi, Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dan Keuangan LNPRT. Neraca-neraca tersebut disusun dalam bentuk T (*double entry statement*) seperti dalam sistem pembukuan bisnis (*micro*). Pada sisi kanan dicatat seluruh sumber atau penerimaan, sedangkan pada sisi kiri dicatat seluruh penggunaan atau pembayaran. Setiap transaksi akan muncul dua kali, yaitu sebagai sumber di suatu neraca dan sebagai penggunaan di neraca yang lain.

Berikut adalah diagram dari kerangka Neraca Produksi LNPRT. Neraca ini menggambarkan aktivitas produksi yang dilakukan oleh LNPRT dalam menyediakan barang/jasa secara gratis/harga non-pasar pada anggota/masyarakat. Neraca ini memuat keterangan tentang nilai barang dan

jasa yang dihasilkan (*output*), biaya atau ongkos produksi yang dikeluarkan (*intermediate consumption*) dalam proses produksi, serta surplus usaha yang tercipta.

Sisi kanan neraca memuat nilai produksi, sedangkan sisi kiri memuat biaya produksi, pajak, surplus usaha dan penyusutan. Komponen surplus usaha dan penyusutan pada Neraca Produksi (item 2 dan 3) akan muncul kembali dalam Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (10) serta Neraca Modal dan Keuangan (17).

Neraca Produksi LNPRT

Penggunaan	Sumber
1. Biaya produksi	5. Jasa layanan
2. Penyusutan	6. Barang dan jasa Lainnya
3. Pajak	
4. Surplus usaha	
Jumlah	Jumlah

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran LNPRT menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran (aktivitas konsumsi) LNPRT. Pada sisi kanan neraca dicatat seluruh komponen pendapatan dalam bentuk, surplus usaha, pendapatan kepemilikan, dan penerimaan transfer. Sedangkan pada sisi kiri neraca dicatat komponen pengeluaran, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran transfer, dan tabungan yang tercipta di LNPRT.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran LNPRT

Penggunaan	Sumber
7. Konsumsi akhir	10. Surplus usaha
8. Transfer keluar	11. Pendapatan kepemilikan
9. Tabungan	12. Transfer masuk
Jumlah	Jumlah

Di dalam Neraca Pendapatan dan Pengeluaran LNPRT, tabungan merupakan rincian penyeimbang. Tabungan diperoleh dengan mengurangi total pendapatan dengan pengeluaran. Tabungan (9) akan muncul kembali di dalam Neraca Modal dan Keuangan (16).

Neraca Modal dan Keuangan LNPRT menggambarkan aktivitas investasi yang dilakukan oleh LNPRT serta sumber pembiayaannya. Pada sisi kanan neraca dicatat sumber pembiayaan investasi dalam bentuk tabungan, penyusutan, dan transfer modal. Pada sisi kiri neraca dicatat investasi baik dalam bentuk fisik/ non finansial seperti barang modal tetap, perubahan stok, maupun dalam bentuk finansial. Pembentukan modal tetap bruto terdiri dari perlengkapan dan peralatan, bangunan, dan lahan. Bentuk investasi finansial meliputi penambahan uang tunai, menabung neto, piutang neto, dan pembelian surat berharga neto.

Penyusutan adalah salah satu sumber pembiayaan investasi, karena penyusutan merupakan bagian pendapatan yang disisihkan untuk mengganti barang modal yang digunakan di dalam proses produksi. Transfer modal seperti hibah dan transfer lain yang bersifat modal dari sektor lain juga merupakan sumber pembiayaan investasi LNPRT.

Neraca Modal dan Keuangan LNPRT

Penggunaan	Sumber
13. Perubahan stok	16. Tabungan
14. Pembentukan modal tetap bruto	17. Penyusutan
- Perlengkapan dan peralatan	18. Transfer modal neto
- Bangunan	
- Lahan	
15. Peminjaman neto	
Jumlah	Jumlah

Di dalam Neraca Modal dan Keuangan LNPRT, selisih antara sumber pembiayaan dengan investasi merupakan rincian penyeimbang dan dicatat pada sisi kiri neraca. Bila bernilai positif, maka rincian penyeimbang dikatakan sebagai peminjaman (*lending*) pada sektor lain. Bila bernilai negatif, maka rincian penyeimbang ini dikatakan sebagai pinjaman (*borrowing*) dari sektor lain.

2.3. Konsep dan Definisi

LNP adalah entitas legal atau sosial yang diciptakan dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dimana status non profit yang disandang tidak mengijinkan lembaga ini menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang menciptakan, mengendalikan atau mendanai. Untuk menjalankan kegiatannya, lembaga ini bisa memperoleh dana yang berasal dari sumbangan. Dengan cara ini, LNP mampu memperoleh aset yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan berupa pendapatan kepemilikan.

Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb:

- ❖ lembaga nonprofit umumnya adalah lembaga formal, meski kadang berupa lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ❖ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting

yang diambil lembaga;

- ❖ setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ❖ kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ❖ istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok berikut:

1. LNP yang terlibat dalam produksi pasar

LNP yang terlibat dalam produksi pasar menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga pasar (berarti secara ekonomi, yaitu harga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap banyaknya output yang ditawarkan produsen dan yang dibeli konsumen. Aturan praktis untuk mengidentifikasi apakah harga berarti secara ekonomi adalah ketika harga yang dikenakan dapat menutup setengah dari biaya produksi. LNP tipe ini melayani korporasi dan rumahtangga.

a. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi

Kelompok ini membatasi kegiatannya untuk melayani produsen tertentu, menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan atau iuran untuk menutup biaya penyediaan jasa tersebut. Iuran ini tidak diperlakukan sebagai transfer melainkan sebagai pembayaran jasa yang diberikan. Tingkat biaya atau harga keanggotaan termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (*economically significant price*). LNP semacam ini umumnya berbentuk asosiasi yang didirikan oleh korporasi untuk menyediakan jasa khususnya bagi anggota, dan sebagian besar dirancang untuk kepentingan promosi, lobi politik serta asistensi bagi anggota. Contoh: kamar dagang,

asosiasi produsen pertanian, asosiasi manufaktur atau perdagangan, organisasi pengusaha. Dalam pengklasifikasian sektor institusi, LNP tipe ini dimasukkan dalam sektor institusi Korporasi.

b. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga

LNP tipe ini menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga pada tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya sekolah, universitas, klinik dan rumah sakit. Tujuan LNP tipe ini bukan untuk amal, namun untuk menyediakan pendidikan, kesehatan atau jasa lainnya dengan kualitas sangat tinggi.

2. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar

LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menyediakan barang dan jasa ke individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi. Artinya harga yang dikenakan tidak dapat menutup setengah biaya produksi sehingga barang dan jasa yang disediakan berbasis non-pasar.

Untuk mendanai kegiatannya, LNP tipe ini bergantung pada dana diluar penerimaan atas penjualan, seperti dari iuran rutin yang dibayar anggota asosiasi yang mengendalikan, sumbangan pihak ketiga termasuk pemerintah, serta pendapatan kepemilikan. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar memisahkan LNP yang dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan pemerintah. Indikator kendali pemerintah menjadi pedoman untuk menentukan LNP non-pasar diklasifikasikan sebagai LNP Pemerintah atau LNPRT. Ada lima indikator yang harus dipertimbangkan sbb:

a. Penunjukan petugas

Pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain

b. Ketentuan lain

Instrumen yang berisi ketentuan selain penunjukkan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP

c. Perjanjian kontrak

Keberadaan perjanjian kontrak antara pemerintah dan LNP memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP

d. Tingkat pembiayaan

LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program yang berarti sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, maka tidak dianggap dikontrol oleh pemerintah

e. Eksposur risiko

Jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan untuk terkena semua atau sebagian besar risiko finansial terkait dengan aktivitas LNP, maka pengaturan tersebut merupakan kontrol.

LNP yang dikendalikan pemerintah dimasukkan dalam sektor institusi Pemerintah. Sedangkan LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah muncul sebagai sektor institusi tersendiri yaitu LNPRT. Sehingga LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau kelompok rumah tangga dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Output LNPRT yang menyediakan jasa ke individu anggota atau rumah tangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumah tangga. Sedangkan output LNPRT yang menyediakan jasa kolektif ke sebagian besar komunitas dianggap tidak hanya sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT, namun juga sebagai pengeluaran konsumsi akhir aktual LNPRT. Jasa kolektif biasanya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, misalnya hasil penelitian LNPRT yang dapat diakses setiap orang. Jasa kolektif ini identik dengan barang publik dalam teori ekonomi.

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan dan beasiswa.

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, terdiri dari:

- ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI
- ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila
- ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita
- ormas lainnya, seperti Kosgoro, dan Pepabri
- partai politik, seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Terdiri dari panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya.
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti IDI, dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial. Terdiri dari:

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan
- Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia
- Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Angrek, ORARI, dan Wanadri
- RT/RW

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya. Terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI
- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI)

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama. Terdiri dari:

- Tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara
- Lembaga Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim
- Lembaga Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP
- Lembaga Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma
- Perkumpulan Jamaah Masjid

- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan dan Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama dan solidaritas. Terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, MERCI
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar
- Lembaga Bantuan Lainnya

Selain konsep dan definisi LNP sebagaimana diuraikan di atas, berikut diuraikan pula prinsip pencatatan di dalam SNNI, serta konsep dan definisi lainnya yang digunakan untuk menyusun neraca.

A. Prinsip Pencatatan

1. *Accrual* dan *Cash Basis*

Prinsip *accrual basis* artinya seluruh data harus dicatat berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi, baik data tentang aktivitas produksi, konsumsi, maupun aktivitas investasi. Contoh, suatu lembaga Panti Asuhan melakukan aktivitas pelatihan keterampilan membuat keset bagi anak asuhnya. Dari hasil aktivitas tersebut keset yang dihasilkan sebanyak 300 buah, dipakai sendiri sebanyak 10 buah, maka yang dicatat tetap 300 buah meskipun yang 10 buah dikonsumsi sendiri oleh panti. Nilai keset yang dikonsumsi sendiri harus diperkirakan sesuai harga pasar, atau sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 10 buah keset.

Prinsip pencatatan yang lain adalah *Cash Basis*. Dalam sistem ini data dicatat berdasarkan transaksi pembayaran secara tunai. Dari contoh di atas, produksi keset yang dicatat hanya senilai 290 buah, sedangkan jumlah yang dikonsumsi sendiri tidak dicatat, sehingga seolah-olah produksinya hanya 290

buah. Sistem pencatatan ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan prinsip (*cash basis*) ini tidak digunakan dalam SNNI.

2. **Double Entry dan Imputasi**

Prinsip *double entry* merupakan sistem dimana suatu pencatatan dilakukan dua kali. Sistem ini terkait dengan azas bahwa setiap transaksi harus ada dua pihak yang terlibat baik sebagai item penerimaan dan pengeluaran, sebagai aktivitas produksi dan konsumsi, atau sebagai pihak pembeli dan penjual. Oleh karena itu, setiap transaksi harus selalu berpasangan. Jika suatu transaksi tidak punya pasangan, maka harus dimunculkan atau diimputasi.

Contoh, pondok pesantren menggunakan meja tulis yang dibuat sendiri oleh para santri. Di dalam kasus ini seolah-olah lembaga itu memperoleh pendapatan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan meja ditambah perkiraan ongkos tukang. Di pihak lain penggunaan atas meja tulis dianggap sebagai pengeluaran investasi yang dilakukan oleh pondok pesantren. Kasus penggunaan meja tulis oleh LNPRT ini, terkait dengan ketiga prinsip penyusunan neraca sebagai berikut:

- i. Prinsip "*accrual basis*", karena nilai meja tulis tersebut dicatat sebagai komponen pengeluaran investasi, meskipun pada kenyataannya lembaga tersebut tidak membelinya.
- ii. Prinsip "*double entry*", karena nilai meja tulis tersebut dicatat baik sebagai komponen pendapatan maupun pengeluaran.
- iii. Prinsip "*imputasi*", karena nilai meja tulis tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan LNPRT.

B. **Neraca Pokok Sektor LNPRT**

Transaksi yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh LNPRT akan dituangkan ke dalam tiga bentuk neraca pokok. Aktivitas ekonomi yang dimaksud mencakup aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi.

Neraca merupakan suatu bentuk kerangka analisis ekonomi makro, yang menunjukkan keseimbangan antara dua sisi. Sisi kanan menggambarkan penerimaan (*resources*), sedangkan sisi kiri menggambarkan pengeluaran (*uses*).

1. **Neraca produksi** adalah neraca dimana sisi kanannya menggambarkan nilai barang dan atau jasa layanan yang dihasilkan (output), sedangkan sisi kirinya menggambarkan nilai penggunaan masukan (input) baik dalam bentuk barang atau jasa maupun faktor produksi.

Aktivitas produksi yang dilakukan LNPRT dibedakan atas aktivitas pelayanan dan aktivitas ekonomis produktif.

- a. **Aktivitas pelayanan** merupakan aktivitas yang dilakukan lembaga dalam menyediakan jasa pelayanan pada anggota atau kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan. Jasa layanan ini disediakan pada tingkat harga di bawah harga pasar atau diberikan secara cuma-cuma.
- b. **Aktivitas ekonomis produktif** adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga dalam menghasilkan barang/jasa, baik untuk digunakan sendiri maupun dijual.

Aktivitas ekonomis produktif adalah aktivitas menghasilkan barang dan jasa dengan ciri-ciri bahwa aktivitas tersebut:

- Umumnya terkait dengan upaya meningkatkan keterampilan anggota atau penerima layanan
- Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan
- Menghasilkan barang dan jasa dengan nilai relatif kecil terhadap seluruh biaya pelaksanaan aktivitas lembaga
- Tidak memerlukan pengadaan barang modal (secara) khusus.

Jika aktivitas ekonomis produktif yang dilakukan oleh LNPRT tidak memenuhi batasan tersebut, maka aktivitas itu dianggap sebagai bukan aktivitas ekonomis produktif. Aktivitas tersebut

diperlakukan sebagai aktivitas produksi dari unit kuasi korporasi bisnis, dan transaksinya tidak dicatat di dalam neraca LNPRRT.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa jasa layanan LNPRRT dijual pada tingkat harga di bawah harga pasar atau bahkan gratis. Oleh karena itu, penilaian atas barang dan jasa layanan (output) harus disetarakan dengan biaya produksi yang dikeluarkan (input) untuk menghasilkan output tersebut.

Biaya produksi adalah nilai penggunaan barang dan jasa maupun faktor produksi, yang memungkinkan lembaga dapat melakukan aktivitas pelayanan. Nilai ini sama dengan nilai konsumsi (antara) barang dan jasa dan kompensasi pegawai. Konsumsi antara meliputi pembelian alat tulis, biaya foto copy, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, biaya administrasi bank, biaya transportasi, bahan bakar, biaya perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lainnya, biaya sewa gedung, biaya sewa perlengkapan kantor dan lain-lain. Kompensasi pegawai terdiri dari upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya. Nilai biaya produksi adalah nilai yang benar-benar dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang/jasa dan faktor produksi. Jika lembaga menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma, maka nilainya harus diperkirakan dengan harga yang berlaku dan senilai yang sama dianggap sebagai penerimaan transfer.

Nilai tambah bruto adalah selisih antara nilai barang/jasa yang dihasilkan lembaga dengan nilai penggunaan barang/jasa antara. Nilai ini akan setara dengan jumlah nilai upah dan gaji pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya (dikurangi subsidi atas produksi lainnya).

Surplus usaha adalah selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan lembaga dengan nilai penggunaan barang dan jasa antara, pengeluaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak atas produksi lainnya dalam proses produksi. Pada neraca produksi, nilai surplus usaha berfungsi sebagai item penyeimbang.

2. **Neraca pendapatan dan pengeluaran** adalah suatu neraca dimana pada sisi kanan menggambarkan berbagai sumber pendapatan yang diterima, sedangkan sisi kirinya menggambarkan jenis pengeluaran "*current*", terutama pengeluaran konsumsi akhir dan tabungan.

Sumber pendapatan yang ada di neraca pendapatan dan pengeluaran LNPRT diantaranya berasal dari penerimaan transfer baik dari dalam maupun luar negeri, dan pendapatan kepemilikan.

Pengeluaran akhir konsumsi adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga untuk melakukan pelayanan. Nilai ini setara dengan nilai jasa pelayanan yang terdapat di sisi kanan neraca produksi.

Transfer adalah penerimaan dan atau pemberian secara cuma-cuma baik dalam bentuk uang maupun barang yang dilakukan oleh lembaga dengan pihak lain. Transfer yang diterima lembaga dari pihak lain disebut transfer masuk, sedangkan transfer yang dikeluarkan lembaga pada pihak lain disebut transfer keluar. Transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transfer berjalan (*current*) dan transfer modal.

Untuk dapat membedakan kedua transfer tersebut, maka aktivitasnya didasarkan atas tiga pertimbangan yaitu: dasar, tujuan, dan frekuensi terjadinya transaksi.

- a. **Transfer berjalan** dari atau ke lembaga adalah seluruh penerimaan/pengeluaran transfer oleh lembaga dengan tujuan untuk konsumsi dan transaksinya dilakukan secara berkala atau rutin.
- b. **Transfer modal** dari atau ke lembaga adalah seluruh penerimaan/pengeluaran transfer oleh lembaga yang tujuannya untuk investasi dan transaksinya tidak rutin.

Jika salah salah satu pihak penerima atau pemberi menganggap transfer yang diterima atau diberikan sebagai transfer modal, maka transfer tersebut diperlakukan sebagai transfer modal. Menurut statusnya transfer modal dibedakan menjadi transfer bersyarat dan transfer tak bersyarat.

- i. Transfer bersyarat mencakup transaksi transfer yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian seperti pembayaran premi asuransi kerugian atas suatu investasi. Sebaliknya sebagai penerimaan bagi lembaga adalah jika memperoleh klaim asuransi kerugian.
- ii. Transfer tak bersyarat mencakup transaksi yang tidak didasarkan pada suatu kontrak perjanjian. Transfer jenis ini dapat berupa barang modal maupun uang yang digunakan untuk pengadaan barang modal.

Pendapatan kepemilikan adalah pendapatan yang terjadi jika faktor produksi yang dimiliki lembaga digunakan untuk aktivitas usaha pihak lain. Pendapatan kepemilikan ini mencakup pendapatan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, dan sebagainya.

Tabungan adalah sisa dari pendapatan lembaga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akhir dan transfer keluar. Nilai ini dalam pembentukan neraca pendapatan dan pengeluaran berfungsi sebagai faktor penyeimbang.

3. **Neraca modal dan keuangan** adalah neraca yang menggambarkan sumber pembiayaan investasi pada sisi kanan dan nilai investasi yang diciptakan baik dalam bentuk fisik (nonfinansial) maupun finansial pada sisi kirinya.

Dalam melakukan aktivitas pelayanannya LNPRT sering menggunakan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang modal.

Barang modal didefinisikan sebagai barang yang mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- i. Umur penggunaan barang modal lebih dari satu tahun, oleh karenanya setiap barang modal memiliki nilai penyusutan
- ii. Manfaat pengadaan barang modal baru terasa untuk jangka panjang
- iii. Nilai per unit barang modal relatif besar terhadap nilai output dari sektor kelembagaan yang menggunakan.

Barang modal yang digunakan oleh LNPRRT dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- i. Barang keperluan administrasi, kantor maupun aktivitas pelayanan.
- ii. Barang modal bangunan, meliputi bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya.
- iii. Barang modal berujud lahan, meliputi lahan untuk tempat tinggal, bukan tempat tinggal, atau lahan lainnya.

C. Indikator Aktivitas Lembaga

Indikator aktivitas lembaga mencakup banyaknya pengurus, tenaga kerja, dan anggota masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari aktivitas yang dilakukan oleh lembaga. Indikator ini menggambarkan besar atau luasnya aktivitas lembaga, dengan batasan sebagai berikut:

1. **Pengurus** adalah individu atau orang yang terlibat langsung maupun tidak dalam penyelenggaraan aktivitas pelayanan yang dilakukan lembaga. Individu yang dimaksud mencakup dewan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya.
2. **Tenaga kerja** adalah individu atau orang yang terlibat langsung di dalam aktivitas pelayanan. Individu tersebut berfungsi sebagai faktor produksi, dan dapat dibedakan atas :
 - i. Tenaga kerja dibayar, yaitu tenaga kerja yang memperoleh upah dan gaji sebagai balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja yang mereka berikan dalam aktivitas pelayanan.
 - ii. Tenaga kerja tidak dibayar atau sukarelawan, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pelayanan, tetapi mereka tidak memperoleh upah dan gaji.
3. **Penerima layanan** adalah individu atau orang yang mendapat manfaat langsung dari aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga. Individu yang dimaksud tergantung pada bentuk lembaga, sebagai berikut:

Bentuk Lembaga dan Penerima Layanan LNPR

Bentuk Lembaga	Penerima Layanan
1. Organisasi Kemasyarakatan	Anggota organisasi
2. Organisasi Sosial	Anak yatim, piatu, cacat fisik, cacat mental, dan orang tua/jompo
3. Organisasi Profesi	Anggota organisasi
4. Perkumpulan Sosial/ Budaya/Olahraga/Hobi	Anggota perkumpulan
5. Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota masyarakat
6. Lembaga Keagamaan	Santri, jemaat, dan anggota keagamaan lain
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa	Anak asuh, pasien tak mampu, dan korban bencana.

<https://www.bps.go.id>

BAB III**ULASAN SINGKAT HASIL PENYUSUNAN**

Sebagaimana diketahui bahwa LNPRT terdiri dari tujuh bentuk lembaga, yaitu: ormas (1); orsos (2); orprof (3); perkumpulan sosial (4); LSM (5); lembaga agama (6); dan OBK (7). Berikut ulasan tentang perkembangan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut selama periode 2011-2013.

Selama periode 2011-2013, rata-rata anggota masyarakat yang terlibat dalam aktivitas lembaga sebanyak 32 orang per lembaga, yang terdiri dari pengurus, tenaga kerja, maupun sukarelawan.

Ulasan diawali dengan beberapa indikator tentang aktivitas lembaga, yang mencakup banyaknya anggota masyarakat yang terlibat di dalam aktivitas lembaga, baik sebagai pengurus, tenaga kerja (dibayar), ataupun sukarelawan (tak dibayar). Indikator ini mengindikasikan ukuran besar kecilnya aktivitas yang dilakukan oleh lembaga.

3.1. Indikator aktivitas lembaga

Selama periode 2011-2013, rata-rata anggota masyarakat terlibat dalam aktivitas lembaga sebanyak 32 orang per lembaga; yang terdiri dari pengurus, tenaga kerja, maupun sukarelawan. Dilihat menurut jenis lembaganya, pada tahun 2013 ormas merupakan lembaga yang memiliki pengurus, tenaga kerja, dan sukarelawan terbanyak, dengan rata-rata 59 orang, sedangkan orsos merupakan lembaga dengan jumlah pekerja paling sedikit yaitu rata-rata 18 orang.

Rata-rata anggota LNPRT selama tahun 2013 sebanyak 367 orang dan 7 lembaga. Penerima manfaat/layanan dari ormas, orprof dan perkumpulan sosial terdiri dari individu, rumah tangga dan lembaga. Ormas memiliki rata-rata

anggotanya paling banyak yaitu sebanyak 1055 orang dan 14 lembaga. Penerima manfaat/layanan orsos, LSM, lembaga keagamaan dan OBK biasanya berbentuk lembaga. Pada tahun 2013 penerima layanan dari keempat organisasi tersebut sebanyak 292 per lembaga.

3.2. Aktivitas produksi

Pada tahun 2011-2013, perkumpulan sosial merupakan lembaga dengan proporsi nilai aktivitas ekonomis produktif terbesar dibanding bentuk lembaga lainnya, yaitu sekitar 7-11 persen dari nilai output.

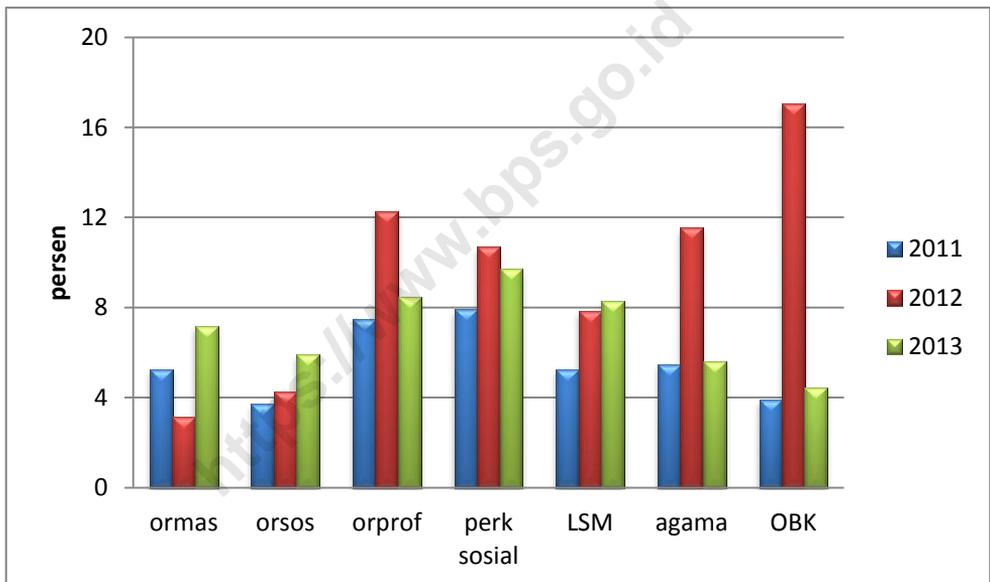
Aktivitas produksi dari LNPRT menghasilkan jasa sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya aktivitas itu disebut juga sebagai aktivitas pelayanan. Selain aktivitas yang utama tersebut, LNPRT juga dapat melakukan aktivitas ekonomis produktif. Aktivitas ekonomis produktif biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota atau penerima layanan dan kadang mendatangkan uang bagi lembaga. Total nilai jasa pelayanan serta barang dan jasa dari aktivitas ekonomis produktif disebut sebagai output LNPRT.

Jasa pelayanan LNPRT disediakan pada tingkat harga yang tidak signifikan secara ekonomi, bahkan gratis. Oleh karenanya, nilai output lembaga dihitung dengan pendekatan biaya (input) yang dikeluarkan. Biaya ini terdiri dari biaya atas penggunaan barang dan jasa (biaya antara) dan penggunaan faktor produksi (biaya primer). Biaya primer terdiri dari upah/gaji, penyusutan, pajak atas produksi lainnya dan surplus usaha. Nilai penggunaan faktor produksi disebut nilai tambah (*value added*) yang tercipta dari aktivitas produksi LNPRT.

Selama periode 2011-2013 output LNPRT di Indonesia mencapai 70,4; 77,58; dan 82,77 triliun rupiah. Output ini terdiri dari nilai jasa pelayanan dan nilai barang dan jasa dari aktivitas ekonomis produktif. Pada tahun 2011-2013 perkumpulan sosial merupakan lembaga dengan proporsi nilai aktivitas ekonomis produktif terbesar dibanding bentuk

lembaga lainnya yaitu sekitar 7-11 persen dari nilai output. Hal ini dimungkinkan karena seringkali barang atau jasa yang dihasilkan organisasi semacam ini dapat dijual pada masyarakat.

Sebaliknya, nilai barang dan jasa dari aktivitas ekonomis produktif terkecil pada tahun 2011 ada pada orsos sebesar 3,71 persen, tahun 2012 ada pada ormas dengan porsi hanya 4,94 persen dan tahun 2013 ada pada OBK sebesar 4,45 persen dari output yang dihasilkan. (**Gambar 3.1**).



Gambar 3.1 Persentase aktivitas ekonomis produktif terhadap output menurut jenis LNPRT, 2011-2013

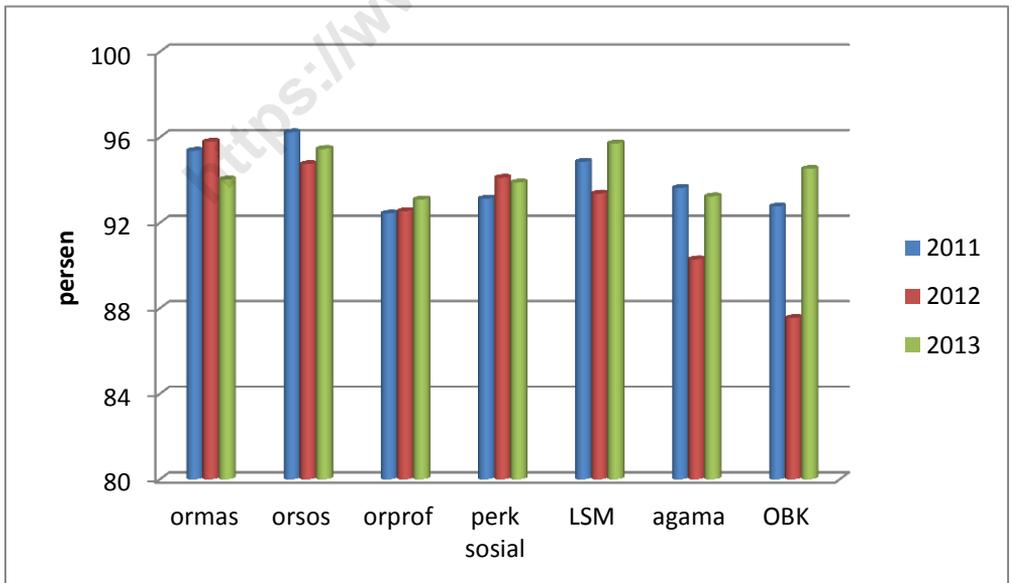
Biaya produksi terdiri dari biaya antara dan upah/gaji. Perkembangan persentase biaya produksi terhadap output menurut jenis LNPRT dijelaskan dalam **Gambar 3.2**. Komposisi biaya antara pada tahun 2013 mencapai 64,54 persen dari nilai total output. Di samping itu, kontribusi upah dan gaji terhadap output pada tahun yang sama sekitar 30,06 persen.

Pada tahun 2013 bentuk lembaga yang memiliki proporsi biaya antara tertinggi adalah perkumpulan sosial, kebudayaan,

Orsos memiliki proporsi biaya antara tinggi. Struktur biaya antara orsos mirip seperti rumah tangga.

olahraga dan budaya (83,96 persen). Selain itu, orsos juga memiliki proporsi biaya antara tinggi yang mencapai 69,64 persen. Tingginya biaya antara orsos dimungkinkan, karena adanya penyediaan makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan kepada anggota masyarakat yang tinggal di panti. Struktur biaya antara orsos mirip seperti struktur konsumsi rumah tangga. Rata-rata penerima layanan dalam orsos sebanyak 245 orang per lembaga.

Pada tahun 2013, OBK merupakan bentuk lembaga yang memiliki proporsi upah dan gaji terbesar yaitu sekitar 34,18 persen. Sedangkan lembaga dengan proporsi upah dan gaji terendah adalah perkumpulan sosial sebesar 9,93 persen (2013). Pengurus organisasi perkumpulan sosial umumnya lebih banyak tenaga kerja tidak dibayar/sukarelawan daripada tenaga kerja dibayar.



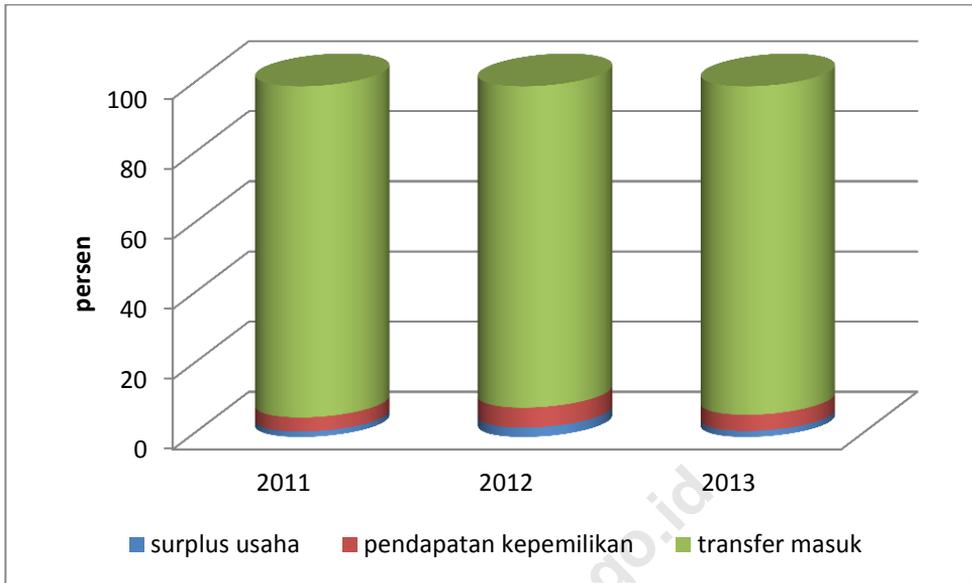
Gambar 3.2 Persentase biaya produksi terhadap output menurut jenis LNPRT, 2011-2013

3.3. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran

Aktivitas pengeluaran oleh sektor LNPRT mencakup aktivitas pengeluaran untuk konsumsi akhir, transfer ke institusi lain dan pembentukan modal. Istilah pengeluaran konsumsi akhir pada sektor LNPRT dapat diartikan sebagai biaya operasional yang dikeluarkan lembaga dalam melakukan aktivitas produksi atau aktivitas pelayanannya. Sedangkan pembentukan modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang modal seperti perlengkapan dan peralatan kantor, alat komunikasi. Sumber dana untuk melakukan berbagai aktivitas pengeluaran dapat diperoleh dari transfer, pendapatan kepemilikan dan pendapatan surplus usaha.

Pengeluaran konsumsi akhir diartikan sebagai biaya operasional yang dikeluarkan lembaga dalam melakukan aktivitas pelayanan.

Penerimaan transfer menjadi sumber pendapatan terbesar bagi LNPRT. Pada tahun 2013, sekitar 93,68 persen dari total penerimaan LNPRT berasal dari transfer. Surplus usaha mempunyai kontribusi paling kecil terhadap total penerimaan LNPRT dan pada tahun 2013 surplus usaha hanya sekitar 1,73 persen (**Gambar 3.3**). Lembaga keagamaan merupakan bentuk lembaga dengan porsi pendapatan transfer yang terbesar yaitu sebesar 94,96 persen dan umumnya merupakan transfer dari rumah tangga. Sedangkan pendapatan kepemilikannya hanya sebesar 2,85 persen.

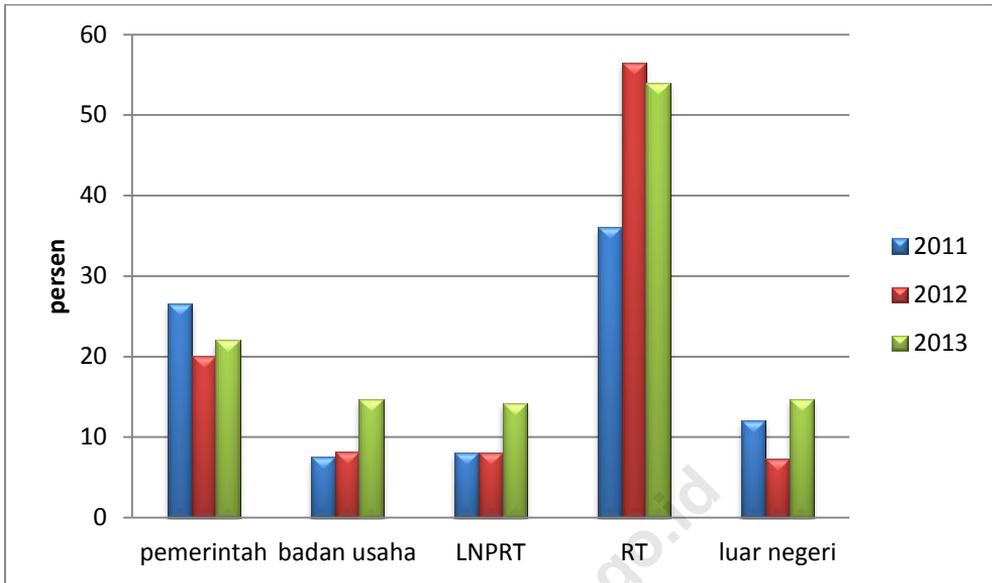


Gambar 3.3 Persentase penerimaan LNPRT menurut jenisnya, 2011-2013

Penerimaan transfer menjadi sumber pendapatan terbesar bagi LNPRT.

Transfer yang diterima dibedakan atas transfer yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Transfer dari dalam negeri dibedakan menurut lembaga pemberi yang terdiri dari rumahtangga, pemerintah, LNP, dan Badan Usaha Swasta.

Transfer yang diterima LNPRT sebagian besar berasal dari dalam negeri dan perorangan atau rumahtangga tercatat sebagai pemberi sumbangan terbesar. Selama kurun waktu 2011-2013, transfer dari perorangan atau rumah tangga berturut-turut sekitar 36,01; 56,52 dan 53,94 persen (**Gambar 3.4**).



Gambar 3.4 Persentase penerimaan transfer LNPRT menurut lembaga pemberi, 2011-2013

Transfer yang diterima LNPRT sebagian besar berasal dari dalam negeri dan perorangan atau rumah tangga tercatat sebagai pemberi sumbangan terbesar.

Rumah tangga memberikan komposisi sumbangan terbesar disebabkan LNPRT dibentuk oleh rumah tangga untuk memberikan jasa pelayanan ke masyarakat. Transfer ini berupa iuran dari anggota LNPRT dan sumbangan berupa uang dan barang dari masyarakat. Pemerintah juga memberikan kontribusi yang besar kepada LNPRT. Melalui APBN/APBD, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sejumlah dana kepada beberapa lembaga seperti lembaga keagamaan, ormas, dan LSM. Organisasi/lembaga dari luar negeri juga ikut memberikan kontribusi kepada penerimaan transfer LNPRT berupa uang dan barang.

Selain berasal dari transfer, LNPRT juga memperoleh pendapatan dalam bentuk surplus usaha dan pendapatan kepemilikan. Tetapi besaran surplus usaha dan pendapatan kepemilikan LNPRT sangat kecil, karena LNPRT merupakan lembaga formal atau informal yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan.

Selama kurun waktu 2011-2013, komposisi surplus usaha sekitar 1-3 persen dan pendapatan kepemilikan sekitar 4-6 persen. Penerimaan surplus usaha dimungkinkan karena adanya aktivitas ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, seperti perkumpulan sosial, kebudayaan, olahraga, hobi menyelenggarakan pentas seni atau pagelaran budaya.

Selama kurun waktu 2011-2013, komposisi surplus usaha sekitar 1-3 persen dan pendapatan kepemilikan sekitar 4-6 persen.

Pendapatan kepemilikan dapat diperoleh LNPRT dari balas jasa atas penggunaan faktor produksi oleh pihak lain. Pendapatan kepemilikan berupa bunga, bagi hasil, dividen, royalti, dan lainnya. Pendapatan kepemilikan terbesar bersumber dari lainnya, karena beberapa LNPRT memiliki modal fisik, kemudian menyewakannya kepada pihak lain. Misalnya penerimaan sewa gedung milik LNPRT.

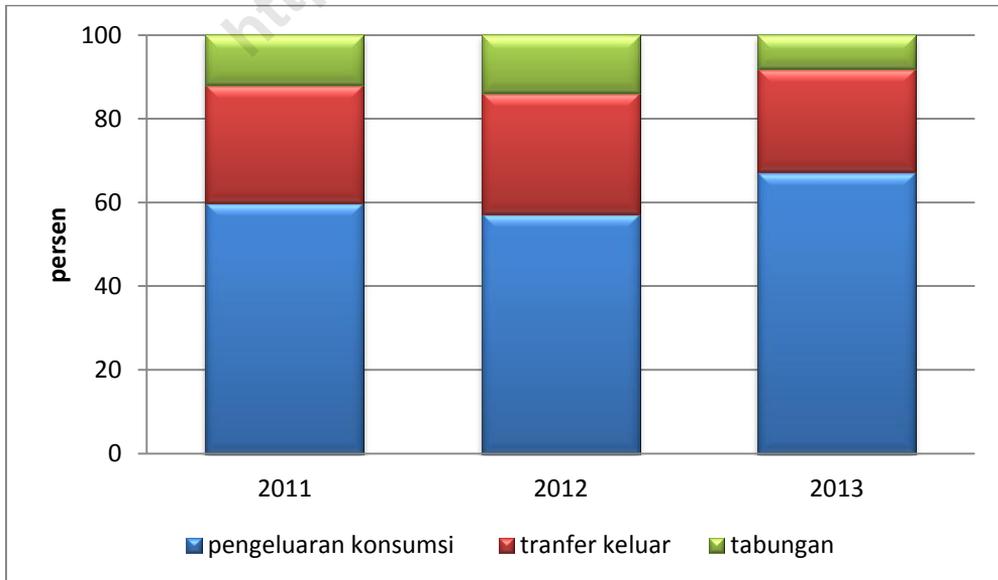
Sebagai suatu lembaga yang bersifat non-profit, sebagian besar pendapatan LNPRT baik dari transfer masuk dan surplus usaha, akan digunakan untuk membiayai aktivitasnya. Pembiayaan seluruh aktivitas disebut sebagai pengeluaran konsumsi akhir.

Selama periode 2011-2013 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT berturut-turut sebesar 66,8; 71,23; dan 77,22 triliun rupiah. Pengeluaran konsumsi akhir pada tahun 2011 mempunyai proporsi sebesar 60,0 persen, kemudian tahun 2012 dan 2013 mencapai 57,37 persen dan 67,28 persen. Pengeluaran konsumsi akhir terdiri dari biaya rapat, biaya fotocopi, barang cetakan, listrik, telepon, upah/gaji, barang dan jasa lainnya. Komponen upah/gaji dan pengeluaran barang dan jasa lainnya memiliki kontribusi yang besar terhadap pengeluaran konsumsi akhir. Pada tahun 2013, kontribusi upah/gaji serta barang dan jasa lainnya masing-masing sebesar 35,30 dan 29,13 persen.

Disamping pengeluaran konsumsi akhir, LNPRT juga melakukan aktivitas membantu unit lain. Bantuan yang dikeluarkan itu disebut sebagai pengeluaran transfer. Pada tahun 2013 ormas dan perkumpulan sosial adalah lembaga yang paling banyak menggunakannya untuk keperluan transfer keluar, yaitu sebesar 31,34 persen dan 30,89 persen. Sementara orsos paling sedikit menggunakan pendapatannya untuk keperluan transfer keluar. Orsos (seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga sosial lainnya) adalah lembaga yang paling banyak menggunakan pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi akhir, khususnya pengeluaran barang dan jasa lainnya.

Pada tahun 2013 Ormas dan perkumpulan sosial adalah lembaga yang paling banyak menggunakan pendapatannya untuk keperluan transfer keluar yaitu sebesar 31,34 persen dan 30,89 persen.

Sementara sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akhir dan pengeluaran transfer, akan berbentuk tabungan. Secara keseluruhan, tabungan yang tercipta pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 8,02 persen dari total pengeluaran LNPRT dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 13,73 persen.



Gambar 3.5 Persentase pengeluaran menurut jenisnya, 2011-2013

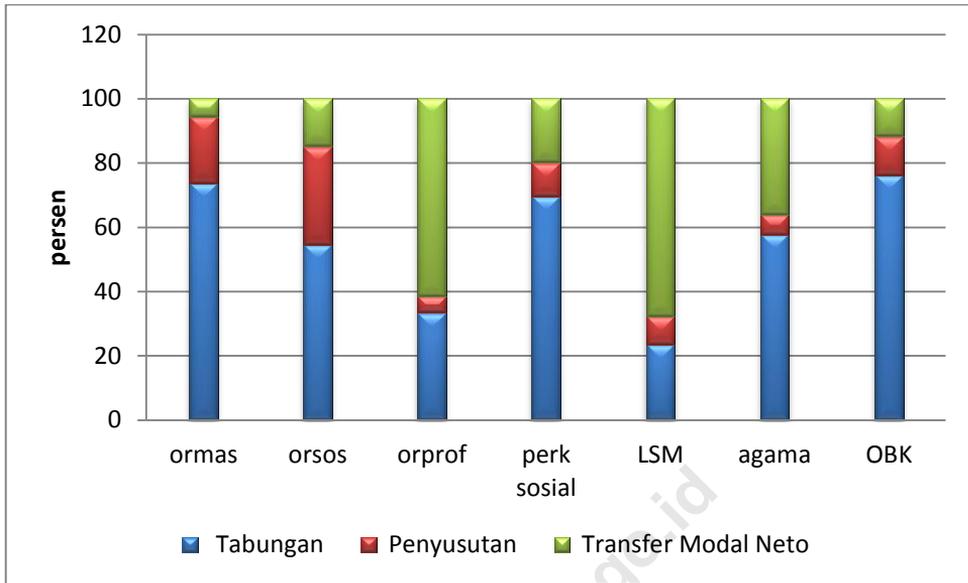
3.4. Aktivitas investasi

Selain melakukan kegiatan produksi dan konsumsi, LNPRT juga melakukan aktivitas investasi. Seperti halnya pada pelaku ekonomi lain, dalam melakukan aktivitasnya LNPRT juga menggunakan barang yang tergolong sebagai barang modal.

Selama periode 2011-2013, sumber dana utama yang digunakan LNPRT untuk melakukan aktivitas investasi berasal dari tabungan.

Barang modal yang dimaksud antara lain dalam bentuk perlengkapan dan peralatan meliputi mebel segala jenis, perlengkapan dan peralatan kantor, alat transportasi, barang elektronik, alat komunikasi dsb, serta bangunan (gedung, rumah dan bangunan lainnya). Pengadaan barang modal yang digunakan untuk aktivitas LNPRT disebut aktivitas investasi fisik. Di samping investasi fisik, LNPRT juga melakukan aktivitas investasi finansial. Pada umumnya investasi finansial ini berujud uang tunai dan tabungan di lembaga keuangan. Sumber dana aktivitas investasi diperoleh LNPRT dari tabungan yang dimiliki, penyusutan barang modal, dan transfer modal neto. Sumber dana lain dapat berasal dari transaksi finansial yang dilakukan, seperti hutang dan menggadaikan barang (neto).

Selama periode 2011-2013, sumber dana utama yang digunakan LNPRT untuk melakukan aktivitas investasi berasal dari tabungan.

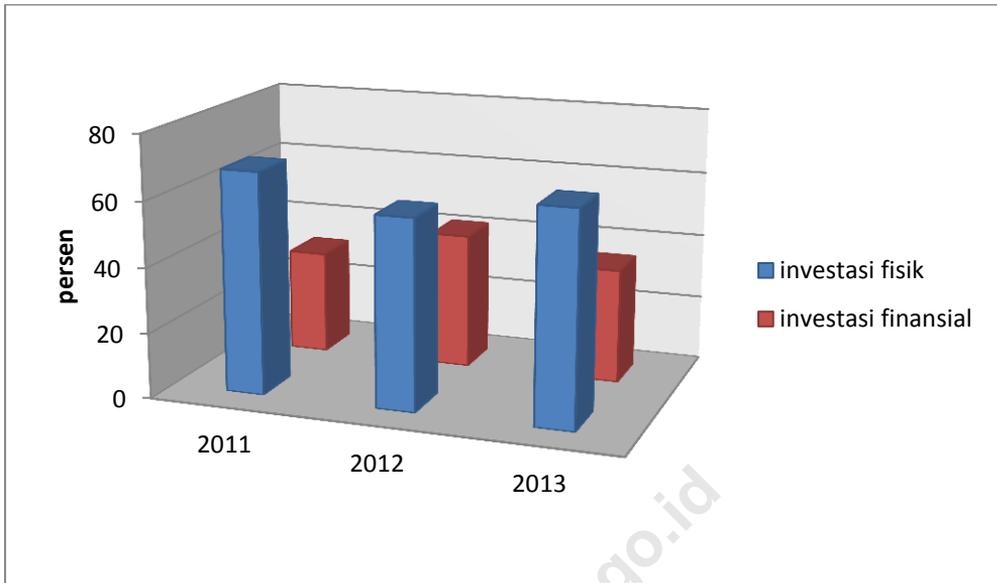


Gambar 3.6 Persentase sumber dana investasi menurut jenis LNPRT, 2013

Sumber dana yang berasal dari hutang dan menggadaikan barang bukan merupakan sumber utama bagi lembaga untuk mengadakan investasi.

Perolehan dana investasi pada lembaga setiap tahunnya memiliki pola yang berbeda. Pada tahun 2013 OBK merupakan lembaga yang memperoleh sumber investasi dari tabungan dengan persentase terbesar dibanding jenis LNPRT lainnya yakni 76,27 persen. Sementara sumber dana investasi LSM banyak diperoleh dari transfer modal, yang kontribusinya mencapai 67,62 persen dari total dana investasi. Transfer modal neto meliputi uang, peralatan dan perlengkapan, bangunan, dan sebagainya.

Investasi LNPRT terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Aktivitas investasi LNPRT umumnya lebih banyak dilakukan pada investasi fisik daripada investasi finansial. Investasi fisik pada 2011-2013 masing-masing mencapai 68,1; 58,28; dan 64,92 persen.



Gambar 3.7 Persentase investasi fisik dan finansial LNPRT, 2011-2013

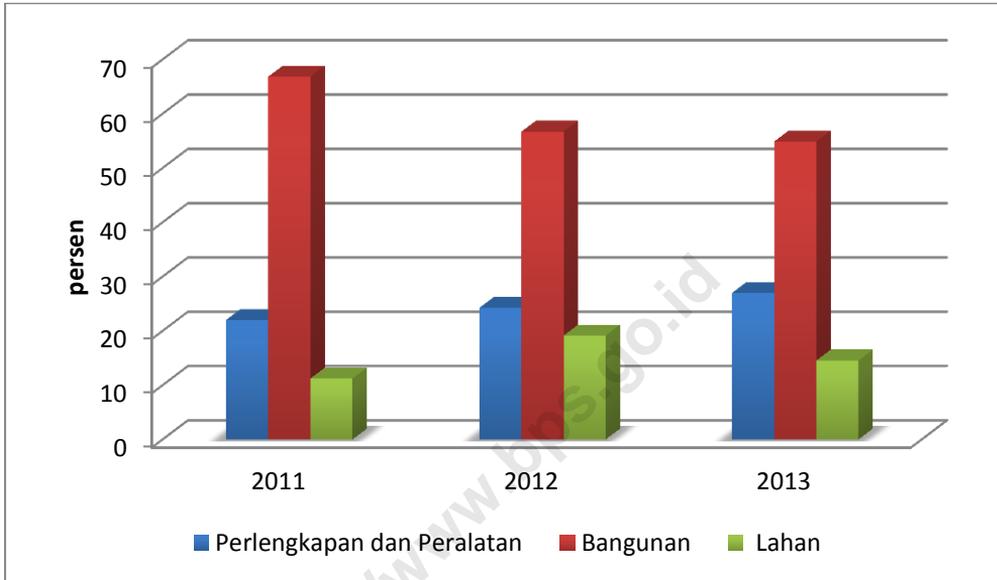
Aktivitas investasi pada tahun 2011-2013 lebih banyak dilakukan pada investasi fisik daripada investasi finansial

Investasi fisik LNPRT tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,64 persen dibandingkan tahun 2012. Investasi bangunan lebih besar proporsinya dibanding investasi lainnya seperti lahan serta perlengkapan dan peralatan.

Jika dilihat dari jenis lembaga, investasi fisik terbesar dilakukan oleh lembaga keagamaan, dimana pada tahun 2013 mencapai 57,47 persen total investasi fisik LNPRT. Ini mungkin disebabkan pembangunan tempat ibadah baru yang terus menjamur. Pada tahun yang sama, perkumpulan sosial adalah lembaga yang paling banyak melakukan investasi finansial dibandingkan investasi fisiknya.

Jika dilihat dari wujudnya, bangunan merupakan investasi fisik yang paling banyak dilakukan. Kontribusinya selama tahun 2011-2013 mencapai 64,6 persen, 55,64 persen, 54,88 persen dari keseluruhan investasi fisik. Menyusul kontribusi dari perlengkapan dan peralatan, lahan dan perubahan stok. Pola investasi pada pembentukan modal

tetap bruto di setiap lembaga ternyata menunjukkan perbedaan karena setiap jenis LNPRT memiliki karakteristik yang berbeda-beda.



Gambar 3.8 Persentase PMTB LNPRT menurut bentuknya, 2011-2013

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Tabel 1.1 Neraca Produksi LNPRT
Periode 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Penggunaan			
Rincian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Biaya Produksi	66,699,933	72,036,084	78.297.365
	94.71	92.85	94,60
2. Penyusutan Barang Modal	1,503,957	1,688,608	1.994.756
	2.14	2.18	2,41
3. Pajak Lainnya atas Produksi	464,698	519,420	491.930
	0.66	0.67	0,59
4. Surplus Usaha	1,759,599	3,335,911	1.981.280
	2.50	4.30	2,39
JUMLAH PENGGUNAAN	70,428,187	77,580,022	82.765.331
	100.00	100.00	100.00
Sumber			
Rincian	2011	2012	2013
(5)	(7)	(8)	(8)
5. Jasa Layanan	66,779,766	71,233,976	77.224.382
	94.82	91.82	93,31
6. Barang/Jasa Lainnya	3,648,421	6,346,046	5.540.949
	5.18	8.18	6,69
JUMLAH SUMBER	70,428,187	77,580,022	82.765.331
	100.00	100.00	100.00

Tabel 1.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRT
Periode 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Penggunaan			
Rincian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Akhir	66,779,766	71,233,976	77.224.382
	59.89	57.37	67,28
2. Transfer Keluar	31,482,001	35,876,630	33.247.674
	28.23	28.90	24,70
3. Tabungan	13,245,867	17,045,739	24.125.192
	11.88	13.73	8,02
JUMLAH PENGGUNAAN	111,507,634	124,156,346	134.597.247
	100.00	100.00	100.00
Sumber			
Rincian	2011	2012	2013
(5)	(6)	(7)	(8)
4. Surplus Usaha	1,759,599	3,335,911	1.981.280
	1.58	2.69	1,73
5. Pendapatan Kepemilikan	4,475,192	7,069,517	6.185.850
	4.01	5.69	4,60
6. Transfer Masuk	105,272,843	113 750 917	126.088.137
	94.41	91.62	93,68
JUMLAH SUMBER	111,507,634	124,156,346	134.597.247
	100.00	100.00	100.00

Tabel 1.3 Neraca Modal dan Keuangan LNPRT
Periode 2011 - 2013 (Juta Rupiah)

Penggunaan			
Rincian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perubahan Stok	323,761	200,830	616.344
	2.20	1.07	2,36
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto			
a. Perlengkapan dan Peralatan	2,138,241	2,593,946	4.606.050
	14.50	13.85	17,63
b. Bangunan	6,496,472	6,074,716	9.366.971
	44.04	3.43	35,86
c. Lahan	1,089,554	2,047,434	2.480.260
	7.39	10.93	9,50
3. Peminjaman Neto	4,701,797	7,817,421	9.050.322
	31.88	41.73	34,65
JUMLAH PENGGUNAAN	14,749,824	18,734,347	26.119.948
	100.00	100.00	100.00
Sumber			
Rincian	2011	2012	2013
(5)	(6)	(7)	(8)
4. Tabungan	13,245,867	17,045,739	24.125.192
	89.80	90.99	82,19
5. Penyusutan	1,503,957	1,688,608	1.994.756
	10.20	9.01	17,81
JUMLAH SUMBER	14,749,824	18,734,347	26.119.948
	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.1 Struktur Neraca Produksi LNPRRT Tahun 2011

Rincian	Penggunaan							LNPRRT
	1	2	3	4	5	6	7	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Biaya Produksi	95.37	96.23	92.43	93.13	94.85	93.63	92.76	94.71
2. Penyusutan Barang Modal	2.22	1.72	1.08	2.40	2.16	2.44	4.16	2.14
3. Pajak Lainnya atas Produksi	1.18	0.40	1.29	0.97	0.44	0.44	1.60	0.66
4. Surplus Usaha	1.23	1.65	5.21	3.49	2.54	3.49	1.48	2.50
JUMLAH PENGGUNAAN	100.00							
	Sumber							
								Kode Lembaga
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5. Jasa Layanan	94.74	96.29	92.54	92.09	94.77	94.52	96.09	94.82
6. Barang/Jasa Lainnya	5.26	3.71	7.46	7.91	5.23	5.48	3.91	5.18
JUMLAH SUMBER	100.00							

Tabel 2.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRRT Tahun 2011

Rincian	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Pengeluaran Konsumsi Akhir	62.02	79.38	79.38	60.14	46.07	69.43	26.18	59.89	
2. Transfer Keluar	24.68	13.25	13.25	20.21	44.15	15.52	66.91	28.23	
3. Tabungan	13.29	7.37	7.37	19.65	9.78	15.05	6.91	11.88	
JUMLAH PENGGUNAAN	100.00								
	Sumber								
	Kode Lembaga								
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. Surplus Usaha	0.81	1.36	3.42	2.28	0.25	2.56	0.40	1.58	
5. Pendapatan Kepermilikan	4.59	3.71	8.17	3.52	2.29	4.47	1.92	4.01	
6. Transfer Masuk	94.60	94.93	88.41	94.20	97.46	92.97	97.68	94.41	
JUMLAH SUMBER	100.00								

Tabel 2.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPR T Tahun 2011

Rincian	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPR T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Perubahan Stok	0.53	3.05	0.59	4.21	2.07	1.39	3.77	2.20	
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto									
a. Perengkapan dan Peralatan	9.62	8.36	11.92	16.41	32.69	10.56	14.21	14.50	
b. Bangunan	21.88	49.49	46.81	31.17	23.12	78.76	23.77	43.58	
c. Lahan	4.09	7.75	7.02	6.47	10.54	6.86	7.85	7.39	
3. Peminjaman Neto	63.87	31.36	33.65	41.74	31.58	2.42	50.40	32.34	
JUMLAH PENGUNAAN	100.00								
	Sumber								
	Kode Lembaga								
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPR T	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. Tabungan	90.14	83.86	96.89	92.61	90.29	89.36	85.91	89.80	
5. Penyusutan	9.86	16.14	3.11	7.39	9.71	10.64	14.09	10.20	
JUMLAH SUMBER	100.00								

Tabel 3.1 Struktur Neraca Produksi LNPRRT Tahun 2012

Rincian	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Biaya Produksi	95,79	94,74	92,55	94,10	93,36	90,29	87,54	92,85	
2. Penyusutan Barang Modal	2,26	2,25	1,96	1,58	2,16	2,42	1,71	2,18	
3. Pajak Lainnya atas Produksi	0,87	0,67	0,60	0,67	1,34	0,42	0,39	0,67	
4. Surplus Usaha	1,08	2,34	4,89	3,65	3,13	6,88	10,35	4,30	
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00								
Rincian	Sumber								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5. Jasa Layanan	96,84	95,73	87,72	89,32	92,18	88,47	82,93	91,82	
6. Barang/Jasa Lainnya	3,16	4,27	12,28	10,68	7,82	11,53	17,07	8,18	
JUMLAH SUMBER	100,00								

Tabel 3.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRRT Tahun 2012

Rincian	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Pengeluaran Konsumsi Akhir	45,81	70,05	64,65	59,97	41,01	54,39	54,09	57,37	
2. Transfer Keluar	31,98	18,49	23,94	21,44	45,53	30,26	39,89	28,90	
3. Tabungan	22,22	11,46	11,41	18,59	13,47	15,35	6,02	13,73	
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00								
Sumber									
Rincian	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. Surplus Usaha	0,51	1,71	3,61	2,45	1,39	4,23	6,75	2,69	
5. Pendapatan Kepemilikan	3,40	9,22	7,31	6,07	2,33	4,55	3,41	5,69	
6. Transfer Masuk	96,09	89,07	89,09	91,47	96,27	91,22	89,84	91,62	
JUMLAH SUMBER	100,00	100,00	100,00	100,00	241,43	100,00	100,00	100,00	

Tabel 3.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPR T Tahun 2012

Rincian	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	LNPR T (9)
1. Perubahan Stok	0,09	1,50	0,38	0,68	1,17	0,79	2,82	1,07	1,07
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto									
a. Perlengkapan dan Peralatan	12,93	11,55	27,21	11,22	17,37	12,49	19,87	13,85	13,85
b. Bangunan	33,82	30,44	28,70	12,79	12,64	54,45	5,93	32,43	32,43
c. Lahan	28,16	14,14	5,80	1,43	1,08	3,23	12,06	10,93	10,93
3. Peminjaman Neto	25,00	42,37	37,91	73,88	67,75	29,04	59,33	41,73	41,73
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00								
	Sumber								
	Kode Lembaga								
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPR T	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. Tabungan	95,41	87,45	88,77	94,62	93,34	91,18	84,38	90,99	90,99
5. Penyusutan	4,59	12,55	11,23	5,38	6,66	8,82	15,62	9,01	9,01
JUMLAH SUMBER	100,00								

Tabel 4.1 Struktur Neraca Produksi LNPRRT Tahun 2013

	Penggunaan								
	Kode Lembaga								
	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
Rincian	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Biaya Produksi	94,02	95,45	93,09	93,88	95,71	93,24	94,52	94,60	
2. Penyusutan Barang Modal	2,66	1,75	2,50	1,11	2,96	2,77	2,65	2,41	
3. Pajak Lainnya atas Produksi	0,56	0,32	0,90	0,60	1,17	0,59	0,21	0,59	
4. Surplus Usaha	2,75	2,47	3,51	4,40	0,16	3,40	2,62	2,39	
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00								
	Sumber								
	Kode Lembaga								
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5. Jasa Layanan	92,85	94,08	91,54	90,28	91,72	94,40	95,55	93,31	
6. Barang/Jasa Lainnya	7,15	5,92	8,46	9,72	8,28	5,60	4,45	6,69	
JUMLAH SUMBER	100,00								

Tabel 4.2 Struktur Neraca Penerimaan dan Pengeluaran LNPRRT Tahun 2013

Rincian	Penggunaan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	LNPRRT (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Pengeluaran Konsumsi Akhir	62,28	79,33	62,92	63,97	68,55	60,65	65,06	67,28	
2. Transfer Keluar	31,34	18,03	25,92	30,89	25,47	23,09	23,50	24,70	
3. Tabungan	6,38	2,64	11,16	5,14	5,98	16,26	11,44	8,02	
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00	100,00							
Sumber									
Rincian	Kode Lembaga								
(10)	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT (18)	
4. Surplus Usaha	1,85	2,08	2,41	3,12	0,12	2,18	1,78	1,73	
5. Pendapatan Kepemilikan	4,39	4,89	4,43	3,26	6,79	2,85	4,22	4,60	
6. Transfer Masuk	93,77	93,03	93,16	93,62	93,09	94,96	93,99	93,68	
JUMLAH SUMBER	100,00	100,00							

Tabel 4.3 Struktur Neraca Modal dan Keuangan LNPRRT Tahun 2013

	Penggunaan																
	Kode Lembaga																
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)									
1. Perubahan Stok	0,89	3,28	0,75	4,03	7,58	0,86	1,45	2,36									
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto																	
a. Perlengkapan dan Peralatan	18,67	15,20	23,88	20,51	18,32	14,61	19,60	17,63									
b. Bangunan	38,26	32,15	35,19	25,31	31,60	41,06	33,17	35,86									
c. Lahan	8,97	7,48	2,84	4,78	6,35	15,78	6,50	9,50									
3. Peninjaman Neto	33,22	41,89	37,34	45,36	36,15	27,70	39,29	34,65									
JUMLAH PENGGUNAAN	100,00																
Sumber																	
Kode Lembaga																	
Rincian	1	2	3	4	5	6	7	LNPRRT									
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
4. Tabungan	78,15	64,13	86,66	86,76	72,97	90,13	86,36	82,19									
5. Penyusutan	21,85	35,87	13,34	13,24	27,03	9,87	13,64	17,81									
JUMLAH SUMBER	100,00																

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Indonesia

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Website : <http://www.bps.go.id>.